



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MEMPERKUAT PERAN STRATEGIS BULOG DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA DAN KETAHANAN RANTAI PASOK NASIONAL

Ari Mulianta Ginting

Analisis Legislatif Ahli Madya

ari.ginting@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Memasuki kuartal akhir tahun 2025, stabilitas harga beras nasional menunjukkan tren positif. Setelah intervensi masif pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa beras menjadi salah satu komoditas yang mengalami deflasi selama dua bulan berturut-turut, yakni bulan September dan Oktober 2025. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran sentral Perum BULOG (BULOG) dalam menggelontorkan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan nontunai yang digulirkan secara serentak di berbagai daerah.

Meskipun demikian, keberhasilan dalam menekan harga tersebut menimbulkan tantangan baru, yakni bagaimana mengoptimalkan fungsi BULOG agar stabilitas harga tidak hanya bergantung pada intervensi sesaat. Tantangan utama kini bergeser dari aspek ketersediaan stok, yang dilaporkan mencapai rekor tertinggi, menjadi persoalan efektivitas distribusi dan manajemen kualitas stok. Di berbagai daerah, terutama di luar Pulau Jawa, penyaluran beras SPHP masih memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan aparat keamanan, untuk menjangkau wilayah terpencil dan menjaga stabilitas harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Sebagai contoh, di Papua, kepolisian daerah setempat turut berperan dalam penyaluran beras SPHP untuk memastikan pemerataan di tiga provinsi.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai proaktif menggunakan instrumen BULOG untuk menekan potensi inflasi akhir tahun. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Solo bekerja sama dengan BULOG kantor wilayah (kanwil) Jateng menyalurkan puluhan ribu ton beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan minyak goreng untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Langkah ini menunjukkan bahwa peran BULOG sebagai operator kebijakan publik (PSO) sangat krusial.

Adanya ketergantungan pada SPHP dan Bantuan Pangan Non-Tunai memunculkan pertimbangan mengenai keberlanjutan serta efisiensi fungsi komersial BULOG. Perusahaan BUMN ini diharapkan untuk tidak hanya sekadar menggunakan stok untuk operasi pasar, tetapi juga dapat mengoptimalkan rantai pasoknya secara keseluruhan. Upaya ke arah tersebut mulai terlihat melalui inovasi BULOG yang menyerap beras petani lokal dari berbagai wilayah di Indonesia dan meluncurkan kemasan baru beras premium komersial. Selain itu, penerapan kebijakan zonasi harga, seperti Zona 1, 2, dan 3, juga dimaksudkan untuk memastikan pemerataan akses di seluruh Indonesia.

Tantangan struktural lainnya adalah manajemen kualitas dari CBP yang melimpah. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan pentingnya manajemen stok yang dinamis untuk menjaga mutu dan kualitas beras. Perputaran stok menjadi kunci agar beras yang tersimpan di gudang BULOG tidak mengalami penurunan kualitas sebelum sampai ke konsumen. Dengan demikian, optimalisasi fungsi BULOG saat ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan aspek ketersediaan, melainkan juga dengan presisi distribusi, manajemen kualitas stok, dan keseimbangan antara peran PSO dan penguatan fungsi komersialnya.

Atensi DPR

Komisi VI DPR RI perlu memberikan atensi khusus terhadap optimalisasi fungsi ganda BULOG. Fokus pengawasan tidak lagi hanya pada ketersediaan stok, tetapi pada efektivitas dan efisiensi distribusi program SPHP dan Bantuan Pangan agar tepat sasaran dan mampu meredam inflasi akhir tahun. Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong BULOG dan Bapanas untuk memastikan manajemen kualitas dan perputaran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) agar beras yang diterima masyarakat tetap layak konsumsi. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga harus mengawal keseimbangan antara penugasan *public service obligation* (PSO) dengan penguatan fungsi komersial BULOG. Komisi VI DPR RI perlu mendukung langkah BULOG dalam menyerap hasil petani lokal dan berinovasi, sehingga BULOG dapat mandiri secara finansial dan tidak hanya bergantung pada anggaran stabilisasi pangan saja. Sinergi antara BULOG, Bapanas, dan Kementerian Perdagangan harus dipastikan berjalan efektif untuk menjaga stabilitas jangka panjang.

Sumber

detikfinance, 4 dan 6 November 2025;
jatengpos.co.id, 7 November 2025;
merdeka.com, 2 November 2025;
viva.co.id, 3 November 2025 .

Minggu ke-1 November
(3 s.d. 9 November 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making